

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Sasaran utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan lingkungan melalui upaya penataan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan meningkatnya masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah sangat diharapkan, sehingga mampu memberikan arah dan tujuan untuk meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, serta mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh. Disamping itu juga harus mampu memberikan informasi permasalahan yang dihadapi khususnya di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, dan sebagai bahan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Permasalahan lingkungan hidup sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di bidang industri, pertambangan, pertanian, transportasi, perdagangan, dan jasa. Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung selama tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

1. Menurunnya fungsi dan potensi hutan seiring dengan makin berkurangnya luasan yang dapat dipertahankan.

Kawasan Gunung Sindoro, Sumbing dan jurang Grawah memiliki kondisi topografis yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan sebaran lahan berupa kawasan hutan produksi, hutan rakyat, dan hutang lindung. Namun, sebagian besar wilayah di

gunung ini telah digunakan untuk lahan pertanian. Sedangkan budidaya tanaman yang dilakukan oleh masyarakat disana masih belum diikuti dengan penerapan teknik konservasi yang baik. Pola intensifikasi pertanian belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pembiayaan. Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis.

Tembakau merupakan salah satu tanaman komoditas perkebunan yang dijadikan andalan dalam peningkatan kualitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sindoro, Sumbing dan Jurang Grawah. Disatu sisi pengembangan tembakau perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, disisi lain dalam pembudidayaannya kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Sehingga berdampak pada penurunan kesuburan tanah dan degradasi lahan.

Penurunan kesuburan tersebut disebabkan penggunaan bahan-bahan kimia (obat-obatan serta pupuk anorganik) secara over dosis ataupun tidak sesuai dengan petunjuk pemakaian. Kesuburan tanah yang menurun menyebabkan produksi pertanian mereka juga turun. Akhirnya kawasan hutan yang seharusnya kawasan lindung dan juga merupakan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) dibuka dan digunakan sebagai lahan pertanian. Padahal, telah kita ketahui bahwa hutan memiliki potensi dan fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi dan fungsi tersebut mengandung manfaat bagi populasi manusia bila dikelola secara benar dan bijaksana. Kelestarian manfaat yang timbul karena potensi dan fungsi didalamnya dapat diwujudkan selama keberadaannya dapat dipertahankan dalam bentuk yang ideal. Hutan juga memberikan pengaruh kepada sumber alam lain. Pengaruh ini melalui tiga faktor lingkungan yang saling berhubungan, yaitu iklim, tanah, dan pengadaan air bagi berbagai wilayah, termasuk wilayah pertanian. Pepohonan hutan juga mempengaruhi struktur tanah dan erosi, jadi mempunyai pengaruh terhadap pengadaan air di lereng gunung.

2. Kerusakan lahan akibat Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Penggunaan lahan perlu memperhatikan daya dukung yang dimiliki oleh lahan tersebut. Dari Hasil Analisa Uji Kualitas Tanah di areal persawahan, ladang tembakau dan hutan rakyat dapat disimpulkan bahwa areal ladang tembakau dan hutan rakyat memiliki tingkat erosi tanah cukup tinggi. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan sifat lahan dapat menimbulkan kerusakan lahan. Dari data tahun 2012 menunjukkan bahwa setiap tahun tanah permukaan di ladang tembakau tererosi sebesar 79,38 ton/ha/tahun, sedangkan pada tahun 2013 ini mengalami penurunan menjadi 77,82 ton/ha/tahun, pada areal hutan rakyat pada tahun 2012 lapisan tanah tererosi sebesar 6,05 ton/ha/tahun dan pada tahun 2013 ini sebesar 5,77 ton/ha/tahun, untuk areal persawahan pada tahun 2012 lapisan tanah tererosi sebesar 0,23 ton/ha/tahun dan pada tahun 2013 ini sebesar 0,22 ton/ha/tahun. Erosi ini menyebabkan tanah yang subur sedikit demi sedikit tergerus oleh air. Lambat laun kesuburan tanah hilang diikuti dengan dan menurunnya daya dukung lahan serta keanekaragaman hayati. Disamping itu, daya serap tanah terhadap air menurun sehingga kandungan air tanah berkurang yang mengakibatkan kekeringan pada waktu musim kemarau.

Tabel 3.1

Hasil Analisis Uji Kualitas Tanah di Lahan Sawah Desa Tanduran Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2013

No	Parameter	Ambang kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan 2013	Melebihi/ Tidak melebihi	Data Tahun 2012	Melebihi / Tidak melebihi
1.	Ketebalan Solum	<20 cm	35	Melebihi	35	Melebihi
2.	Kebatuan permukaan	>40%	<10	Tidak melebihi	<10	Tidak melebihi
3.	Komposisi fraksi	<18% koloid	23.17	Melebihi	21.09	Melebihi
		>80% pasir kuarsitik	30.12	Tidak melebihi	32.16	Tidak melebihi
4.	Berat isi	1,4 g/cm ³	2.02	Melebihi	2.06	Melebihi
5.	Porositas	<30%;>70%	35.98	Melebihi	39.81	Melebihi

	total					
6.	Derajat pelulusan air	<0,7cm/jam; >8,0cm/jam	14.33	Melebihi	13.43	Melebihi
7.	pH (H ² O)1:2,5	<4,5; >8,5	6.54	Tidak melebihi	6.12	Tidak melebihi
8.	Daya hantar listrik (DHL)	>4,0mS/cm	2.29	Tidak melebihi	2.55	Tidak melebihi
9.	Redoks	<200mV	-22.8	Tidak Melebihi	-19.2	Tidak Melebihi
10.	Jumlah mikroba	<10 ² cfu/g tanah	2,18x10 ⁵	Tidak Melebihi	2.64x10 ⁵	Tidak Melebihi
11.	Lapisan Tanah Tererosi	Ton/ha/thn	0,22		0,23	

Sumber : Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Kontruksi Yogyakarta, 2013

Tabel 3.2

Hasil Analisis Uji Kualitas Tanah di Hutan Rakyat Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013

No	Parameter	Ambang kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan 2013	Melebihi/ Tidak melebihi	Data Tahun 2012	Melebihi/ Tidak melebihi
1.	Ketebalan Solum	<20 cm	>100	Melebihi	>80	Melebihi
2.	Kebatuan permukaan	>40%	<10	Tidak Melebihi	<10	Tidak melebihi
3.	Komposisi fraksi	<18% koloid	3,34	Tidak Melebihi	3,52	Tidak melebihi
		>80% pasir kuarsitik	68,32	Tidak Melebihi	73,25	Tidak Melebihi
4.	Berat isi	1,4 g/cm ³	2,47	Melebihi	2,61	Melebihi
5.	Porositas total	<30%;>70%	47,55	Tidak Melebihi	50,57	Tidak Melebihi
6.	Derajat pelulusan air	<0,7cm/jam; >8,0cm/jam	11,31	Melebihi	10,81	Melebihi
7.	pH (H ² O)1:2,5	<4,5; >8,5	5,25	Melebihi	5	Melebihi
8.	Daya hantar listrik (DHL)	>4,0mS/cm	2,17	Tidak Melebihi	2,2	Tidak Melebihi
9.	Redoks	<200mV	388,7	Melebihi	398,8	Melebihi
10.	Jumlah mikroba	<10 ² cfu/g tanah	5,09x10 ⁵	Tidak Melebihi	5,23x10 ⁵	Tidak Melebihi
11.	Lapisan Tanah Tererosi	Ton/ha/thn	5,77		6,05	

Sumber : Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Kontruksi Yogyakarta, 2013

Tabel 3.3

Hasil Analisa Uji Kualitas Tanah di Ladang Tembakau Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013

No	Parameter	Ambang kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan 2013	Melebihi/ Tidak melebihi	Data Tahun 2012	Melebihi/ Tidak melebihi
1.	Ketebalan Solum	<20 cm	>150	Melebihi	>150	Melebihi
2.	Kebatuan permukaan	>40%	<5	Tidak Melebihi	<5	Tidak Melebihi
3.	Komposisi fraksi	<18% koloid	5,35	Tidak Melebihi	5,57	Tidak Melebihi
		>80% pasir kuarsitik	70,41	Melebihi	72,24	Melebihi
4.	Berat isi	1,4 g/cm ³	1,99	Tidak Melebihi	1,98	Tidak Melebihi
5.	Porositas total	<30%;>70%	43,29	Melebihi	42,93	Melebihi
6.	Derajat pelulusan air	<0,7 cm/jam; >8,0cm/jam	4,18	Melebihi	4,46	Melebihi
7.	pH (H ² O) 1:2,5	<4,5; >8,5	5,57	Melebihi	5,41	Melebihi
8.	Daya hantar listrik (DHL)	>4,0mS/cm	3,91	Melebihi	3,75	Melebihi
9.	Redoks	<200mV	413,2	Melebihi	422,3	Melebihi
10.	Jumlah mikroba tanah	<102 cfu/g	9,55x10 ⁵	Tidak Melebihi	9,76x10 ⁵	Tidak Melebihi
11.	Lapisan Tanah Tererosi	Ton/ha/thn	77,82		79,38	

Sumber : Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Kontruksi Yogyakarta, 2013

3. Kemerrosotan Keanekaragaman Hayati

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan upaya konservasi yang memadai, maka menyebabkan kemerrosotan keanekaragaman hayati. Faktor-faktor yang menyebabkan kemerrosotan keanekaragaman hayati meliputi konversi lahan, eksploitasi yang berlebihan, praktik teknologi yang merusak pencemaran, introduksi jenis asing, dan perubahan iklim. Konversi hutan menjadi peruntukan lain dan pemanenan hasil hutan secara tidak berkelanjutan dan/atau kegiatan pembalakan hutan secara illegal

merupakan ancaman bagi ekosistem hutan, yaitu akan mengakibatkan degradasi fungsi hutan, kemerosotan keanekaragaman hayati, dan fragmentasi habitat. Kekhawatiran banyak pihak sejak pencanangan program pembangunan di Indonesia terhadap kerusakan tatanan ekosistem telah terbukti, yaitu dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

Penyelamatan dan pengelolaan sumber keanekaragaman hayati tidak hanya berada di kawasan konservasi tetapi juga terdapat di kawasan produksi dan budidaya. Dimana dalam areal produksi dan budidaya juga telah dibebankan kewajiban untuk melakukan upaya konservasi keanekaragaman hayati sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Penyebab utama kepunahan satwa sebagian besar yang hidup di hutan wilayah Kabupaten Temanggung disebabkan adanya penebangan liar, kebakaran hutan, kegiatan penambangan dan terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini terjadi dalam bentuk perubahan kawasan lindung menjadi lahan pertanian maupun lahan pertanian menjadi lahan permukiman.

Kepunahan, penurunan atau erosi genetik ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan kemampuan regenerasi atau perbanyakannya. Sementara penurunan populasi dapat berlangsung melalui beberapa tahap sehingga jumlah populasi menjadi sangat kecil dan sangat mudah untuk punah.

Penyebab kerusakan keanekaragaman ini diantaranya adalah kebijakan dan strategi ekonomi yang tidak sesuai, lemahnya penegakan hukum, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan., pengenalan spesies asing dan kebijakan pertanian yang tidak sesuai (Bappenas, 1993).

Permasalahan yang terjadi pada keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Temanggung membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari permasalahan ini adalah kelangkaan flora dan fauna yang dulu banyak dijumpai di daerah ini. Sedangkan dampak positif lebih banyak diakibatkan oleh

keberhasilan pembangunan dengan sistem budidaya yang bersifat buatan misalnya pada ternak dan produksi tanaman pangan serta menjamurnya industri pengolahan kayu.

Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan di Indonesia yang selama 40 dekade belakangan ini belum menganggap keanekaragaman hayati sebagai asset untuk dikelola secara berkelanjutan. Hal ini jelas terlihat pada kebijakan yang mengatur pembangunan nasional serta sektoral seperti kehutanan dan pertanian. Meskipun pada kenyataannya asset negara sesungguhnya adalah sumber keanekaragaman hayati, pembangunan nasional lebih memberikan penekanan pada industrialisasi. Di sektor pertanian, praktek monokultur khususnya tanaman pangan telah mengakibatkan erosi genetika dan spesies. Di sektor kehutanan penekanan dan pengambilan kayu dan perkebunan kayu dengan penanaman sedikit spesies asing, telah mengakibatkan degradasi ekosistem maupun erosi spesies.

Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati hampir tidak ada, terutama karena hal ini menjadi tanggung jawab berbagai departemen. Hal ini telah menyebabkan sulitnya koordinasi program dan strategi, dengan kepentingan dan urusan masing-masing sektor.

4. Pencemaran Air

Pencemaran air sungai terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar dari berbagai kegiatan (industri, pertanian, peternakan, rumah tangga dll). Pencemaran tersebut mengakibatkan penurunan kualitas air sungai sehingga tidak memenuhi persyaratan peruntukan yang ditetapkan. Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan agar dapat diketahui sumber polutan penyebab penurunan kualitas. Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai.

Dari hasil pemantauan dan penelitian kualitas air sungai disepanjang sungai prioritas di wilayah administratif Kabupaten Temanggung dengan pengamatan parameter fisika, kimia, dan biologi lingkungan dapat diketahui bahwa ada beberapa parameter

yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan sesuai Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Kadar Maksimal sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Kualitas sumber air di Kabupaten Temanggung, umumnya tergolong cukup baik, kecuali sumber air tertentu yang mendapat tekanan cukup tinggi baik oleh kegiatan domestik, industri, pertambangan, pertanian maupun aktifitas lainnya. Dampak yang berasal dari aktifitas manusia sangat dominan mempengaruhi kualitas sumber air di Kabupaten Temanggung, jika dibandingkan dengan pengaruh alami.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan setelah dianalisis di laboratorium, dapat diketahui bahwa pada 6 (enam) titik sampel air Sungai prioritas menunjukkan sebagian besar parameter yang melebihi kriteria mutu air adalah parameter kimia organik seperti Minyak, Lemak dan Detergen sedangkan parameter mikrobiologi total coliform dan fecal coliform.

Limbah rumah tangga seperti deterjen, sampah organik, dan anorganik memberikan andil cukup besar dalam pencemaran air. Sumber limbah cair di Kabupaten Temanggung berasal dari limbah permukiman penduduk, rumah makan/restoran, rumah sakit, dan hotel. Dalam rumah tangga, air digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan berbagai keperluan lainnya. Setelah digunakan, air dibuang atau mengalir ke selokan. Selanjutnya, air tersebut mengalir ke sungai. Air buangan rumah tangga atau dikenal sebagai limbah domestik mengandung 95% sampai 99% air dan sisanya berupa limbah organik. Berikut data hasil uji limbah cair domestik di beberapa titik di lokasi Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.5.

**Uji Kualitas Limbah Cair Perumahan Gemoh Asri, Butuh,
Temanggung Tahun 2013**

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisis	Kadar Maksimal Baku Mutu Air Limbah Domestik
1.	BOD 5	mg/l	10	100
2.	TSS	mg/l	3	100
3.	Minyak dan Lemak	mg/l	6,4	10
4.	PpH	mg/l	8,03	6 - 9.

Sumber : Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup, Tahun 2013

Tabel 3.6

Uji Kualitas Limbah Cair PT. Tirta Mas Lestari, Pikatan, Mudal, Temanggung Tahun 2013

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisis	Golongan Baku Mutu Air Limbah I
A.	FISIKA			
1.	Temperatur	°C	28,2	38
2.	TDS	mg/l	119	2000
3.	TSS	mg/l	1	100
B.	KIMIA			
1.	PpH		8,22	6 - 9.
2.	BOD 5	mg/l	2	50
3.	COD	mg/l	14,26	100
4.	Khrom heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l	<0,01	0.1
5.	Besi terlarut (Fe)	mg/l	<0,3	5
6.	MBAS	mg/l	0,14	5
7.	Sianida (CN)	mg/l	0.001	0.05
8.	Seng (Zn)	mg/l	<0,05	5
9.	Minyak mineral	mg/l	0.092	10

Sumber : Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup, Tahun 2013

Tabel 3.7.

Outlet IPAL TPA Sanggrahan Tahun 2013

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisis	Golongan Baku Mutu Air Limbah I
A.	FISKA			
1.	Temperatur	°C	30,5	38
2.	TDS	mg/l	>2000	2000
3.	TSS	mg/l	620	100
B.	KIMIA			
1.	pH		7,82	6 - 9.
2.	BOD 5	mg/l	460	50
3.	COD	mg/l	2218	100
4.	Khrom heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l	<0,01	0.1
5.	Besi terlarut (Fe)	mg/l	4,02	5
6.	MBAS	mg/l	2,2	5
7.	Sianida (CN)	mg/l	0,61	0.05
8.	Seng (Zn)	mg/l	0,18	5
9.	Minyak mineral	mg/l	0	10

Sumber : Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup, Tahun 2013

Tabel 3.8

Kualitas Limbah Cair Outlet IPAL Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung Tahun 2013

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisa	Kadar Maksimum Baku (Perda No.10 Thn 2004)
I	FISKA			
1.	Suhu	°C	25,2	30
2.	TSS	mg/L	1	30
II	KIMIA			
1.	pH	-	7,56	6,0 - 9,0
2.	BOD ₅	mg/L	10	30
3.	COD	mg/L	17,4	80
4.	NH ₃ -N Bebas	mg/L	0,81	0.1
5.	Phospat (PO ₄ -P)	mg/L	0,17	2
III	MIKROBIOLOGI			
1.	Kuman Golongan Coli	MPN/ 100 ml	1800	5000

Sumber : Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup, Tahun 2013

Dari hasil uji kualitas limbah cair di berbagai kegiatan/industri yang ada di Kabupaten Temanggung, dapat disimpulkan bahwa lingkungan perairan di Kabupaten Temanggung sudah mulai tercemar

oleh berbagai macam kegiatan/Industri. Permasalahan limbah dan sistem sanitasi lebih banyak disebabkan tumbuhnya kawasan permukiman dan industri. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan, kebutuhan air semakin meningkat dan kondisi lingkungan dirasa semakin menurun sehingga keberadaan air semakin terancam. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi air akan dapat dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia dengan tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar, menurut tujuan penggunaannya.

Penanganan limbah cair rumah tangga umumnya masih menjadi satu dengan drainase yang memanfaatkan beberapa sungai sebagai saluran buangan utama. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat disamping tumpukan limbah (sampah) yang dapat mengurangi estetika lingkungan.

3.2 Telaahan visi Misi dan Program Bupati Temanggung

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan 5 (lima) tahun ke belakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun potensi yang kesemuanya perlu dikelola dengan baik melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan visi misi pembangunan daerah 2014 -2018.

VISI

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS,
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH”**

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya

kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

- 1.** Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
- 2.** Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
- 3.** Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
- 4.** Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
- 5.** Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
- 6.** Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial,

budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Visi misi pembangunan daerah merupakan penjabaran visi misi Bupati terpilih 2013-2018. Adapun telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu berprinsip pada tujuan pembangunan Kabupaten Temanggung yang **berkelanjutan dan ramah lingkungan**. Pembangunan berkelanjutan/ sustainable development didefinisikan sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Terdapat tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang kesemuanya harus dipenuhi secara seimbang.

Untuk mewujudkan konsep *pembangunan yang berorientasi pada lingkungan* dalam periode 2013 – 2018 **Visi** Kabupaten Temanggung adalah ” **TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH**” yang didukung dengan **Misi** ”**Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan**”

Pembangunan yang berwawasan lingkungan mempunyai makna bahwa segala pembangunan yang dilaksanakan saat ini dan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia saat ini diharapkan tidak mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang untuk melakukan pembangunan yang juga memanfaatkan sumberdaya di masa datang.

visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.9

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BLH Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung

Visi : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan			
A	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan lanjutan sampah, khususnya sampah dipemukiman 2. Belum semua desa/kelurahan mempunyai kelompok bank 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya anggaran utk sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana 2. SDM Pengelola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat yang tinggi utk memilah / mengolah sampah dari sumber 2. Potensi ekonomi

		sampah, bank sampah yg ada blm mempunyai sarana dan prasarana yg memadai		sampah 3. Jumlah sampah meningkat 4. Kesempatan kerja
B	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan terhadap kebersihan dan penghijauan khususnya di wilayah perkotaan 2. Kurangnya pelatihan/training untuk menciptakan kader-kader lingkungan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan 3. Belum tersosialisasinya peringatan hari-hari lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana pendukung dan koordinasi yang dilakukan diantara SKPD terkait 2. Kurangnya anggaran dan sarana prasarana 3. Kurangnya sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan dan penghijauan 2. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan yang semakin meningkat
C	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kegiatannya untuk peningkatan fungsi kawasan lindung diluar kawasan hutan 2. Kurang tersedianya data SDA yang valid dan akurat 3. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dukungan anggaran 2. Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kerjasama dengan lembaga donor 2. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan SDM 3. Peningkatan kerjasama dan kesepahaman terkait permasalahan dan program
D	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Belum semua kegiatan/usaha berperan aktif dalam program bank pohon (CSR lingkungan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi lintas sektor 2. Kesadaran masyarakat pemanfaat lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian dan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan (CSR) 2. Pemberdayaan masyarakat pemilik dan pemanfaat lahan
E	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan	Kurangnya sarana prasarana	

	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	lingkungan hidup		
F	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat difungsikan sebagai RTH khususnya di wilayah perkotaan 2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan RTH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan terbatas 2. Semakin banyak lahan-lahan yang di atasnya didirikan bangunan utk pemukiman maupun kegiatan usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya di perkotaan akan fungsi RTH 2. Optimalisasi lahan publik yang ada 3. Pelibatan masyarakat untuk pemanfaatan di lahan privat

3.3 Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung berdasarkan sasaran rencana strategis BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 beserta faktor penghambat dan pendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Permasalahan Pelayanan BLH Berdasarkan Renstra BLH Provinsi Jateng Beserta Faktor penghambat dan Pendorong

N O	Sasaran Jangka Menengah Renstra BLH Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

A	Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium Lingkungan	Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan.	Kurangannya anggaran, sarana prasarana pendukung dan SDM	Tersedianya bangunan laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan yang dapat ditingkatkan menjadi laboratorium terakreditasi.
B	Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir, Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas 3. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran 2. Minim koordinasi antar SKPD terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi anggaran yang ada 2. Kerjasama dengan lembaga donor peduli lingkungan 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama SKPD terkait
C	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/RTH Perkotaan	Terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat difungsikan sebagai RTH khususnya di wilayah perkotaan	Semakin banyak lahan-lahan yang di atasnya didirikan bangunan utk pemukiman maupun kegiatan usaha	Ketersediaan anggaran serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya di perkotaan akan fungsi RTH
D	Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kegiatannya untuk peningkatan fungsi kawasan lindung diluar kawasan hutan 2. Kurang tersedianya data Lahan Kritis yang valid dan akurat 3. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Ketidaksamaan data antar lembaga / instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kerjasama dengan lembaga peduli lingkungan 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD
E	Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sarana Prasarana 2. Belum tersedianya jabatan fungsional PPNS dan PPLHD sebagai instrumen 	Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas	

		pengawasan terhadap pelaku pencemaran.		
F	Meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan dalam PLH	1. Rendahnya kapasitas apartur (SDM) dalam pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup		Peningkatan kualitas SDM dengan kursus dan diklat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung :

Tabel 3.11

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pasal 37	Fungsi lindung mulai berkurang karena pergeseran fungsi (pertanian/tegalan) yang tidak ramah lingkungan, yang mempengaruhi lingkungan dibawahnya			
2	Pasal 38	Luasan Kawasan resapan air berkurang dan beralih fungsi utk pemukiman dan industri (kc. Parakan)			
3	Pasal 39	Kawasan sempadan sungai beralih fungsi untuk bangunan			
4	Pasal 44	Luasan RTH belum sesuai dengan ketentuan, jumlah RTH yang bisa diakses masyarakat terbatas Belum semua kota kec menginventarisasi RTH dan menata yg sudah ada			

5	Pasal 55	Pergeseran fungsi kawasan lindung diluar kawasan hutan belum menjai kawsan budidaya dan pemuiman/industri			
6	Pasal 69	Kawasan Peruntukan Industri	Industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri	Semua kegiatan / usaha wajib Amdal wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri	Wilayah Kawasan Peruntukan Industri harus detail sampai ke dusun
7	Pasal 70	Non Kawasan Peruntukan Industri	Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak	Tidak ada kgiatan / usaha yang tidak berdampak terhadap lingkungan	Wilayah non Kawasan Peruntukan Industri detail sampai ke dusun

b. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program

Tabel 3.12

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanganan persampahan	Belum optimalnya penanganan sampah, khususnya sampah dipermukiman	1. kesadaran masyarakat masih rendah 2. Keterbatasan	1. Potensi ekonomi sampah 2. kuantitas yang

			SDM	meningkat 3. kesempatan kerja
2	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan	Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Minimnya anggaran 2. Kesadaran masyarakat 3. keterbatasan data	1. optimalisasi anggaran yang ada 2. kerjasama dengan lembaga donor peduli lingkungan 3. inventarisasi data SDA dan lingkungan
3	Ruang Terbuka Hijau	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau	1. anggaran minim 2. SDM minim 3. Kesadaran masyarakat pemanfaat lahan	1. Kerjasama dengan lembaga donor 2. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan SDM 3. Pemberdayaan masyarakat pemilik dan pemanfaat lahan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis pelayanan BLH Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 dilakukan oleh BLH pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkungan Hidup dengan melibatkan semua kepala bidang, semua kasi, dan beberapa staf. Isu – isu strategis yang disepakati adalah sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup
3. Berdampak besar pada publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemudahan untuk menangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan pertimbangan kriteria tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat konversi/alih fungsi lahan (pertanian, industri, pemukiman), yang berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan
4. Meningkatnya beban pencemaran dari domestik, industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil
5. Meningkatnya volume timbulan sampah seiring dengan penambahan jumlah penduduk
6. Meningkatnya Permasalahan Sosial kemasyarakatan dan lingkungan perkotaan
7. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan terhadap limbah yang dibuang ke lingkungan.
8. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait.